RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

AKD: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Bulan: November 2023

Oleh: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Implementasi UU tentang Ombudsman telah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU tentang Ombudsman menyebutkan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. UU tentang Ombudsman mempertegas keberadaan Ombudsman secara kelembagaan. Sejalan dengan itu, terdapat juga ekspektasi besar dari masyarakat yang mengharapkan adanya suatu layanan publik yang baik. Pada kenyataannya, pada saat ini fungsi dari Ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum optimal. Pada praktiknya masih ada penyelenggara pelayanan publik yang melakukan penundaan dalam pelayanan publik, penyimpangan prosedur administrasi, atau penyelenggara pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan baik dalam bidang pertanahan, kepolisian, pendidikan, maupun bidang lainnya, sehingga masyarakat kerap kali mengeluhkan buruknya pelayanan publik. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Ombudsman kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana pengaduan akan pelayanan publik tersebut. Selain itu, output atau keluaran dari Ombudsman hanyalah berupa rekomendasi. Sampai dengan saat ini dalam UU tentang Ombudsman belum diatur mengenai mekanisme paksa kepada penyelenggara layanan publik yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Guna meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik dan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan kewenangan Ombudsman, maka sangat penting untuk melakukan penyempurnaan materi muatan dalam UU tentang Ombudsman, meliputi:

1.Pengakuan Kedudukan sebagai lembaga negara yang belum diikuti pengakuan kedudukan anggota Ombudsman sebagai pejabat negara di dalam UU tentang Ombudsman yang berpengaruh pada prinsip keseimbangan/kesamaan kedudukan pada saat berkoordinasi dengan lembaga negara yang lain;

2.Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai susunan organisasi dan tata kerja Ombudsman dari pusat hingga daerah;

3.Penambahan tugas dan fungsi Ombudsman untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri sebagai wujud pengawasan atas pelayanan publik;

4.Ketaatan atas rekomendasi Ombudsman yang memerlukan norma di dalam UU tentang Ombudsman agar instansi pelaksana mau mematuhi rekomendasi Ombudsman; dan

5.Pengaturan tentang manajemen sumber daya manusia di Ombudsman, khususnya mengenai status Anggota Ombudsman serta tugas, fungsi, dan status kepegawaian asisten Ombudsman

Sumber: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230920-052627-9561.pdf

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Baleg Usulkan Rekomendasi Ombudsman Bersifat Mengikat	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46405/t/Baleg%20Usulkan%20Rekomendasi%20Ombudsman%20Bersifat%20Mengikat
Berita	DPR Samangat Memperkuat Kewenangan Ombudsman RI	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/45336
Berita	Jhon Kenedy Usul Perkuat Kewenangan Ombudsman	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46488/t/Jhon%20Kenedy%20Usul%20Perkuat%20Kewenangan%20Ombudsman
Berita	OJK Gandeng Ombudsman Tingkatkan Pelayanan Publik	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/5090
Berita	Ombudsman RI: Ada Kelalaian dalam Penanganan	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/43803
Berita	Pemerintah janji menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/43481
Berita	Perkuat Ombudsman, Baleg DPR Setujui Hasil Panja RUU Ombudsman Diproses Ke Tahapan Selanjutnya	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46525/t/Perkuat%20Ombudsman,%20Baleg%20DPR%20Setuju%20Hasil%20Panja%20RUU%20Ombudsman%20Diproses%20Ke%20Tahapan%20Selanjutnya
Berita	Rekomendasi sering dicuekin, Ombudsman perlu diperkuat	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/45003
Berita	Seluruh Fraksi Sepakat Perkuat Kewenangan Lembaga Ombudsman Melalui Revisi RUU	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46558/t/Seluruh%20Fraksi%20Sepakat%20Perkuat%20Kewenangan%20Lembaga%20Ombudsman%20Melalui%20Revisi%20RUU
Jurnal	Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: A Systematic Mapping Study	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/34271/18231
Jurnal	EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	file:///C:/Users/USER/Downloads/303-Article%20Text-1271-3-10-20151116.pdf
Jurnal	Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia	https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/624/829
Jurnal	Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara	https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/768/960
Jurnal	Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/viewFile/2757/1683
Jurnal	Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia	https://media.neliti.com/media/publications/316060-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelay-ffb4bb5a.pdf
Jurnal	PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK	https://berkas.dpr.go.id/pusluit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-207.pdf?1700905243
Jurnal	Role of Ombudsman Republic Indonesia as an Institution of Public Service Implementation Supervisory for Disability	https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/13031
Jurnal	STRATEGI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENSOSIALISASIKAN PERAN KEPADA MASYARAKAT	https://jurnal.umj.ac.id/index.php/pentahelix/article/view/18988/9290
Buku	Komisi Ombudsman Nasional : Evaluasi terhadap Formasi dan Implementasi Kebijakan Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000)	https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=26963&keywords=ombudsman

Buku	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	https://berkas.dpr.go.id/pusat\npuu/naskah-akademik/public-fil\ne/naskah-akademik-public-23.pd\nf
Buku	Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=21\n615&keywords=ombudsman
Dokumen	CATATAN RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023 TANGGAL 28 MARET 2023	https://berkas.dpr.go.id/akd/d\nokumen/BALEG-RJ-20230405-12352\n8-4135.pdf
Dokumen	LAPORAN SINGKAT RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023	https://berkas.dpr.go.id/akd/d\nokumen/BALEG-RJ-20230929-04503\n3-6919.pdf
Dokumen	LAPORAN SINGKAT RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023 TANGGAL 28 MARET 2023	https://berkas.dpr.go.id/akd/d\nokumen/BALEG-RJ-20230405-12341\n5-4205.pdf
Dokumen	LAPORAN SINGKAT RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023 TANGGAL 25 MEI 2023	https://berkas.dpr.go.id/akd/d\nokumen/BALEG-RJ-20230615-01500\n1-9094.pdf
Dokumen	LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023 TANGGAL 30 MEI 2023	https://berkas.dpr.go.id/akd/d\nokumen/BALEG-RJ-20230615-01494\n3-9255.pdf
Dokumen	LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023 TANGGAL 5 APRIL 2023	https://berkas.dpr.go.id/akd/d\nokumen/BALEG-RJ-20230414-01084\n3-8371.pdf
Dokumen	RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-09-2019	https://puspanlakuu.dpr.go.id/\nproduk/detail-resume/id/152
Undang-undang & Peraturan	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	https://berkas.dpr.go.id/akd/d\nokumen/BALEG-RJ-20230920-05262\n7-9561.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/229068/peraturan-ombudsm\nan-ri-no-48-tahun-2020

Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/5150/pp-no-21-tahun-2011
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/159987/pp-no-4-tahun-202 \n1
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/5277
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/42301/perpres-no-20-tahu \nn-2009
Undang-undang & Peraturan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/229563/peraturan-ombudsm \nan-ri-no-25-tahun-2017
Undang-undang & Peraturan	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	https://berkas.dpr.go.id/akd/d \nokumen/BALEG-RJ-20230920-05303 \n8-1220.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	https://www.dpr.go.id/dokjdih/ \ndocument/uu/UU_2008_37.pdf